



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

DINAMIKA HUBUNGAN BIROKRASI DAN POLITIK DI INDONESIA: ANTARA KOLABORASI DAN KONFLIK

Moch. Faturrohman¹, Monica Putri Syakira², Muhammad Rafi Sulistio³, Muhammad Yasir Jihad⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia,
msyakira@icloud.com

Abstrak. Hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia merupakan dinamika yang kompleks, melibatkan aspek kolaborasi dan konflik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dan politik sebagai pengambil keputusan. Dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia, kolaborasi antara birokrasi dan politik seringkali diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, konflik juga kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, intervensi politik dalam pengambilan keputusan administratif, serta praktik politisasi birokrasi yang mengurangi profesionalisme dan netralitas aparatur sipil negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur, regulasi, serta studi kasus yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan birokrasi dan politik sangat bergantung pada keseimbangan antara otonomi birokrasi dan akuntabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme birokrasi, serta penguatan sistem demokrasi untuk mengurangi potensi konflik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan sinergi yang lebih baik antara birokrasi dan politik di Indonesia

Kata Kunci: *birokrasi, politik, kolaborasi, konflik, Indonesia.*

Abstract. The relationship between bureaucracy and politics in Indonesia is a complex dynamic, involving aspects of collaboration and conflict. This article aims to analyze the interaction between bureaucracy as a policy implementer and politics as a decision maker. In the context of the democratic system in Indonesia, collaboration between bureaucracy and politics is often needed to realize effective governance. However, conflicts also often arise due to differences in interests, political intervention in administrative decision-making, and the practice of politicizing bureaucracy that reduces the professionalism and neutrality of state civil servants. This study uses a qualitative approach by reviewing relevant literature, regulations, and case studies. The results of the analysis show that the success of the relationship between bureaucracy and politics is highly dependent on the balance between bureaucratic autonomy and political accountability. Therefore, bureaucratic reform is needed that focuses on increasing the capacity, integrity, and professionalism of the bureaucracy, as well as strengthening the democratic system to reduce the potential for conflict. This article is expected to contribute to efforts to create better synergy between bureaucracy and politics in Indonesia.

Keywords: *bureaucracy, politics, collaboration, conflict, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara birokrasi dan politik memiliki peran penting dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, interaksi antara kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan, terutama dalam konteks sistem demokrasi yang terus berkembang. Birokrasi berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sementara politik bertindak sebagai pengarah kebijakan melalui proses legislatif dan eksekutif. Idealnya, hubungan ini bersifat saling melengkapi, di mana birokrasi bekerja secara profesional untuk mewujudkan visi politik yang telah disepakati oleh masyarakat melalui proses demokrasi.

Namun, realitas menunjukkan bahwa hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia sering kali dipenuhi oleh dinamika yang kompleks. Kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif sering terhambat oleh kepentingan politik yang mendominasi. Di sisi lain, konflik dapat muncul akibat politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang, serta kurangnya profesionalisme dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelayanan publik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dalam konteks sejarah Indonesia, hubungan birokrasi dan politik telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan peralihan dari rezim otoritarian ke sistem demokrasi. Era Orde Baru, misalnya, ditandai dengan birokrasi yang sangat terkooptasi oleh kepentingan politik penguasa. Sementara itu, era reformasi memberikan peluang bagi birokrasi untuk lebih independen, meskipun tantangan politisasi tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia terus bergerak antara kolaborasi dan konflik.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam dinamika hubungan ini guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi maupun konflik antara birokrasi dan politik. Kajian ini juga menjadi relevan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka (review literatur). Menurut Creswell, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang konsep atau fenomena yang kompleks dari perspektif partisipan. Pendekatan ini menekankan pengumpulan data deskriptif, seperti observasi, dan analisis dokumen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi yang terkait dengan majalah, buku-buku kajian, dan perangkat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan, mengelompokkan, dan membandingkan informasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Hubungan Birokrasi Dan Politik Di Indonesia



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Hubungan politik dan birokrasi sudah lama di bahas oleh berbagai ilmuwan termasuk Ilmu Politik. Politik dan birokrasi lahir dan mendapat pengakuan dari para scientist berkat tulisan Woodrow Wilson dengan judul, "The Study of Administratin" yang dimuat pertama kali oleh The Journal Political Science Quarterly pada Tahun 1887. Menurut Wilson, perlu adanya ilmu yang mengkaji mengenai masalah administrasi dan membantumenerjemahkan kebijakan-kebijakan politik. Politik dan administrasi harus dipisahkan karena keduanya memiliki tugas yang berbeda. Pemisahan antarapolitik dan administrasi dimaksudkan agar birokrasi politik dapat bekerjasecara profesional dalam melayani kepentingan umum (publik interest) tanpadibebani oleh isu-isu politik (Kumorotomo, Wahyudi. 2005).

Politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan. Politik dan birokrasi harus saling mendukung meskipun mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Di satu sisi, dua sifat yang berbeda dari dua institusi ini memungkinkan ruang untuk kerja sama yang baik, tetapi di sisi lain, ketika dua institusi ini bekerja sama, ada rasa perselingkuhan yang kuat. Institusi yang juga disebut sebagai pusat kekuasaan adalah politik. Kekuasaan politik mencakup berbagai bidang, seperti pembuatan, penerapan, dan evaluasi kebijakan publik. Meskipun birokrasi memiliki semua sumber dayanya, politik harus masuk ke sistem kenegaraan sebagai aktor yang memimpin birokrasi melalui mekanisme politik formal. Akibatnya, birokrasi pemerintah selalu terlibat dalam kegiatan politik (Aziz dan Hidayat, 2016).

Saat ini, hubungan antara politik dan birokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarahnya. Hubungan itu dibentuk oleh sejarah yang telah mendahuluinya, bukan muncul sendiri. Mempelajari sejarah politik-birokrasi Indonesia dapat membantu kita memahami birokrasi modern, terutama politisasi birokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu, melakukan penelitian sejarah akan membantu kita memahami patologi birokrasi (patologi birokrasi) yang sering melanda birokrasi publik di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Dwiyanto penting untuk mempertimbangkan hubungan sejarah ketika melihat berbagai fenomena dan masalah yang muncul dalam birokrasi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya budaya pelayanan dalam birokrasi Indonesia (Dwiyanto, Agus, dkk.. 2006).

Soekarno bertindak sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden setelah kekuasaan Belanda berakhir di Indonesia. Sistem pemerintahan selalu berubah seiring dengan bangsa itu berkembang. Indonesia memperbaiki pemerintahannya beberapa kali. Dimulai dengan sistem presidensial dari 1945 hingga 1949, kemudian sistem Parlementer dari 1949 hingga 1950, dan kembali ke sistem presidensial dari 1959 hingga sekarang. Setelah keluarnya Maklumat X wakil presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, politisasi birokrasi di era Orde Lama dimulai. Karena hampir semua karyawan berafiliasi dengan partai politik, birokrasi publik sedikit banyak dipengaruhi oleh peningkatan posisi tawar partai politik (Sinambela, dkk.. 2006). Birokrat-birokrat lebih senang berpolitik praktis dan mengurus partai politik, daripada melakukan pelayanan kepada publik, sehingga fungsi pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya pada masa itu .

Selain itu, penerapan pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengikutinya pada tahun 1950-1959 menyebabkan pergantian kabinet sering terjadi hanya dalam beberapa bulan. Karena itu, birokrasi sangat terpecah secara politik. Birokrasi publik dipengaruhi oleh pergantian menteri. Pada masa itu, politisasi birokrasi sangat kuat karena menteri-mentri yang berkuasa dengan

leluasa mengangkat pejabat birokrasi dan pegawai pemerintah yang berasal dari partainya. Selain itu, ideologi revolusi Soekarno memainkan peran penting dalam mempolitisasi birokrasi. Birokrasi terpolitisasi karena keinginan Soekarno untuk mendorong seluruh bagian bangsa, termasuk birokrasi, untuk mendukung revolusi yang dia gagaskan. Ideologi ini kemudian ditentang oleh Bung Hatta, yang menginginkan birokrasi profesional dan berfungsi sebagai abdi negara sepenuhnya. Puncak dari perbedaan pemahaman ini adalah mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden (Purwanto dan Kumorotomo, 2005).

Selama Orde Baru, Soeharto meningkatkan otoritasnya dengan menggunakan istilah seperti stabilitas, ketahanan nasional, pembangunan, dan monoloyalitas. Soeharto menggunakan pendekatan developmentalisme, yang kemudian mendorongnya untuk memobilisasi seluruh kekuatan yang ada saat itu—Golkar, militer, dan birokrasi—untuk mendukung program pembangunan yang dia inginkan. Disebabkan oleh fakta bahwa birokrasi digunakan oleh pemerintah sebagai alat yang efektif untuk memiliki kendali atas kehidupan politik rakyat, birokrasi terlibat dalam pergulatan politik pemerintah. Ini sejalan dengan pendapat Kurniawan bahwa keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi selama Orde Baru telah menyebabkan dominasi politik dan mengganggu netralitas birokrasi. Birokrasi menjadi bagian dari pertarungan politik dan bahkan menjadi salah satu pilar kekuatan politik tertentu (Kurniawan, Agung, 2005). Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama rezim Orde baru berkuasa telah terjadi semacam konspirasi antara pemerintah dan birokrasi untuk memperkokoh kekuasaan pemerintah.

Disamping itu, kebijakan monoloyalitas Orde Baru mendorong pertumbuhan politisasi birokrasi di Indonesia. Untuk mendukung Golkar, yang tidak ingin disebut sebagai partai politik tetapi sebenarnya bepolitik, birokrasi dan militer dimobilisasi. PNS dan militer hanya diizinkan menyampaikan aspirasi politik mereka kepada Golkar. Di Golkar, simpatisannya berasal dari tiga sumber: fungsionaris Golkar, militer, dan birokrasi. Karena birokrasi publik dibutuhkan sebagai aktor publik yang netral dan adil, hal ini menjadi dilematis. Namun, pada masa Orde Baru, politik pemerintah telah mengganggunya, sehingga birokrasi digunakan untuk mendukung kemenangan partai politik pemerintah (Yudiatmaja, 2015).

Pasca Reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan anasir-anasir politik gencar dilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus menerus. BJ Habibie, yang saat itu menjadi presiden, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 (PP No.5/1999), yang menekankan PNS harus netral. Walaupun PNS akan menjadi anggota parpol, maka harus tidak boleh aktif dalam jabatannya. Bagian dari aturan yang sama juga mencakup unsur militer (TNI) dan kepolisian (Polri). Setelah itu, gaung reformasi birokrasi selalu bergema di mana-mana. Aturan netralitas PNS itu dikuatkan lagi dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974 (Fakhrudin, 2012).

Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa Reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi masih sering terjadi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa Reformasi, walaupun dapat ditekan. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi, walaupun pemerintah sedang berusaha mewujudkan good governance dengan cara membentuk badan-badan yang dianggap perlu untuk menciptakan birokrasi yang baik, tidak berbelit-belit, dan akuntabilitas yang tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pembuatan E-KTP, dan visi Indonesia dapat menerapkan birokrasi bersih pada 2025 belum mampu membuat kondisi Indonesia menjadi lebih baik, seakan-akan gaung yang diidamkan pasca-krisis 1998 tentang reformasi hilang tidak berbekas (Aziz dan Hidayat, 2016).

B. faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kolaborasi maupun konflik antara birokrasi dan aktor politik di Indonesia

Hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia adalah kisah yang rumit dan penuh warna, dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Salah satu hal yang paling mencolok adalah kuatnya intervensi politik dalam struktur birokrasi. Birokrasi sering kali berada di bawah tekanan kekuatan politik, terutama dalam penempatan jabatan. Akibatnya, sistem karier dan rekrutmen yang seharusnya berbasis merit menjadi terganggu. Posisi strategis kerap diberikan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi karena loyalitas kepada partai penguasa. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan, tetapi juga mengancam profesionalisme birokrasi itu sendiri.

Budaya kerja dalam birokrasi juga menjadi tantangan besar. Pola pikir yang terlalu terpaku pada aturan sering membuat birokrasi kehilangan fleksibilitas dan inovasi, sehingga pelayanan publik terasa lambat dan tidak responsif. Ironisnya, meskipun ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirancang untuk menjaga konsistensi pelayanan, sering kali SOP ini dilanggar demi kepentingan pribadi atau politis. Hasilnya adalah munculnya praktik-praktik seperti suap dan pungutan liar yang semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Struktur organisasi birokrasi di Indonesia juga tidak luput dari permasalahan. Jumlah aparat yang terlalu banyak sering kali menciptakan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lambat. Selain itu, banyaknya birokrat yang kurang terampil memperburuk keadaan, karena mereka kesulitan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan berkualitas (Ramli Mahmud dkk, 2022).

Regulasi dan kebijakan juga memengaruhi hubungan antara birokrasi dan politik. Ketidaksinkronan antara berbagai peraturan perundang-undangan sering membuat birokrasi terjebak dalam kerumitan hukum yang sulit diatasi. Upaya reformasi memang telah dilakukan, seperti dengan hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan netral dari intervensi politik. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama karena kurangnya evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak efektif. Pengawasan dan akuntabilitas adalah aspek lain yang tak kalah penting. Pengawasan yang lemah membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Padahal, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi pemerintah. Sayangnya, banyak birokrat yang masih enggan untuk terbuka kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus

menurun. Dibutuhkan reformasi sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan ini.

Dinamika sosial dan budaya juga turut berperan. Birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan besar dari budaya lokal hingga pengaruh global seperti westernisasi. Perubahan sosial yang begitu cepat membutuhkan birokrasi yang adaptif dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara lebih baik. Namun, budaya patronase yang masih kuat di dunia politik sering memperkuat hubungan transaksional antara pejabat politik dan birokrat. Dukungan politik, misalnya, sering menjadi imbalan atas dukungan administratif, yang pada akhirnya menghambat profesionalisme dan reformasi dalam birokrasi.

Jika kita melihat semua ini secara keseluruhan, jelas bahwa hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia adalah sesuatu yang kompleks, penuh tantangan, tetapi juga penuh peluang untuk perbaikan. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, semua pihak harus bekerja bersama. Dibutuhkan reformasi berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam tinjauan ilmu sosial, dapat disimpulkan bahwa manusia ada di muka bumi sebagai pemimpin yang menunjang nilai kepemimpinan dengan tujuan membangun kemaslahatan hidup. Menurut Stogdill kepemimpinan secara garis besar adalah seni meningkatkan kepatuhan, pengaruh dan sebagai bentuk Tindakan persuasi. Wahyusumidjo juga mengutarakan pendapatnya, bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seorang untuk menduduki suatu jabatan untuk mempengaruhi sifat orang lain agar berpikir dan bertindak menuju hal yang positif yang memberikan sumbangsih nyata pada lingkup organisasi (Saebani, 2018).

Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk membangun birokrasi yang profesional dan integritas tinggi. Hal ini bukan hanya demi efektivitas pemerintahan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki citra birokrasi, dan memulihkan kepercayaan rakyat. Perubahan ini mungkin tidak instan, tetapi dengan komitmen bersama, harapan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih manusiawi dan berdaya saing tinggi bukanlah mimpi belaka.

C. upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan konflik antara birokrasi dan politik, serta bagaimana keberhasilannya.

Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki fungsi untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan publik yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan hingga pelayanan publik yang terkait dengan pemerintah jenis pengaturan dan layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan komunitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan utilitas, antara lain. Pelayanan pemerintah Oleh karena itu, segala kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan manajemen yang disediakan oleh penyedia layanan yang terkait untuk kepentingan umum (Latif, Adam., et al, 2019).

Fakta bahwa pelayanan publik di Indonesia belum berfungsi dengan baik sering dibicarakan, baik dalam literatur maupun penelitian. Permasalahan pelayanan publik yang buruk ini disebabkan oleh banyak hal yang kompleks, mulai dari budaya. perusahaan yang tetap paternalistik, lingkungan kerja yang tidak ramah terhadap perubahan zaman, sistem kompensasi yang buruk di birokrasi Indonesia, dan mekanisme yang lemah akibat bagi aparat birokrasi, ketidakmampuan mereka untuk melakukan tindakan pilihan, serta kurangnya komitmen pimpinan daerah untuk menyediakan



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

pelayanan publik yang responsif, bertanggung jawab, dan jujur (Sahrir, Ramlah. 2022). Di masa kemerdekaan wilayah yang memberikan kemampuan setiap kabupaten atau kota untuk mengelola pemerintahannya sesuai dengan Selain itu, kebutuhan dan kepentingan daerah sendiri ternyata tidak dapat dicapai pelayanan publik yang berfungsi dengan baik.

Kegagalan birokrasi pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang menghargai hak dan martabat warga negara sebagai pengguna layanan juga melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat Uceng, Andi., et al, (2019) pada tingkat yang lebih luas, ketidakpercayaan antara pihak swasta dan pihak asing untuk investasi di suatu wilayah karena ketidakpastian pelayanan public.

Untuk mengatasi kondisi ini dan menjawab tantangan zaman yang bergerak ke arah globalisasi, reformasi dan rasionalisasi birokrasi diperlukan di Indonesia. Dalam pelayanan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengubah dan memperbaiki struktur. Birokrasi pelayanan yang terkesan lamban, berbelit-belit, dan tidak adil Pemerintahan yang baik (good governance).

Karena perubahan yang begitu cepat terjadi di bidang politik, ekonomi, dan sosial, reformasi birokrasi muncul. Ciri khas birokrasi Indonesia adalah representasi organisasi yang lamban, kaku, berbelit-belit, dan terpusat, serta struktur hierarki komando. Jadi, birokrasi menjadi rumit, mahal, dan tidak efisien. Untuk mencapainya, diperlukan suatu kesadaran akan pentingnya memperbaiki birokrasi sebagai sistem publik. Reformasi adalah transformasi dari suatu sistem yang telah ada sejak lama. Upaya untuk mengubah birokrasi yang dilakukan dengan sumber daya manusia, dana, prasarana dan masalah lainnya untuk menghasilkan kebijakan, perilaku, program dan hal-hal lain.

Reformasi pelayanan publik membangun harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dan peningkatan pelayanan publik. Merupakan upaya untuk menekankan hak dan kewajiban setiap warga negara dan warga negara serta tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan publik. Di dalam Untuk reformasi, peraturan hukum yang jelas diperlukan. Untuk meningkatkan kualitas, memastikan penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan standar umum pemerintahan yang baik, dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang saat menjalankan pelayanan public (Andi Asmawati., et al, 2021).

Proses manajemen perubahan diperlukan agar reformasi birokrasi berhasil. Proses menentukan, memulai, menerapkan, dan mengintegrasikan perubahan dalam individu, kelompok, atau organisasi dikenal sebagai manajemen perubahan. Rangka mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungannya, tumbuh dan menghasilkan keuntungan manajemen perubahan terdiri dari tujuh langkah.

Langkah pertama, adalah menentukan cita-cita, masalah, dan solusi organisasi untuk membangkitkan semangat dan komitmen setiap anggota. Pada saat ini, setiap lini pemerintahan harus memahami tujuan instansi dan mereka hadapi, dan bagaimana mereka menangani atau menyelesaikannya dengan bekerja sama. Jika mereka ingin melakukan solusi bersama, mereka harus terlibat dalam diskusi dan keputusan.

Langkah kedua, mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Langkah ketiga, menentukan ke pimpinan. Didalam instansi pemerintahan, kepemimpinan biasanya di pegang para pejabat eselon. Padahal, kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujur yang berperan sebagai pemimpin pada level-level di bawahnya.

Langkah keempat, fokus pada hasil kerja. Langkah itu dilakukan dengan membuat mekanisme *assessment* yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberi tugas tertentu.

Langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi.

Langkah keenam, membuat peraturan formal, sistem, maupun struktur yang mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi

Langkah ketujuh, mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespons permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung.

Selain melakukan restrukturisasi manajemen, dalam meningkatkan reformasi birokrasi diperlukan upaya-upaya strategis yang disebut juga dengan **Strategi reformasi birokrasi diantaranya** (Husni, Muthia Fadhillah. 2022).

- a. Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan).
- b. Pada level organisasional, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.
- d. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan (Husni, Muthia Fadhillah. 2022).

Masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka yang dia miliki. Dari perspektif mikro, hal-hal berikut dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Membuat kontrak pelayanan (Citizens' charter) Kontrak pelayanan adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Kontrak pelayanan diperlukan karena beberapa hal : 1) untuk memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan. 2) memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggara pelayanan, 3) mempermudah pengguna layanan, warga, dan stakeholder lainnya dalam mengontrol praktik penyelenggara pelayanan, 4) untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggara pelayanan 5) membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan aspirasi pengguna layanan.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

2. Untuk mempertahankan kepuasan masyarakat, perlu dikembangkan suatu sistem untuk menilai kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut ide tentang manajemen pelayanan, kepuasan Pelanggan dapat mencapai apabila penyedia menyediakan produk dan layanan pelayanan memenuhi standar kualitas masyarakat. Akibatnya, survei Kepuasan pelanggan sangat penting untuk peningkatan pelayanan public (Mustanir, Ahmad, 2017).
3. Penggunaan pemerintahan elektronik dalam manajemen layanan publik: lembaga pemerintah semakin didorong untuk membangun model komunikasi dan transaksi yang sepenuhnya bergantung pada jaringan. Internet untuk mengurangi biaya dan mengubah penyedia layanan ke masyarakat dengan mengurangi interaksi langsung yang sebenarnya adalah sumber yang korupsi ini adalah keuntungan dari menerapkan pemerintahan elektronik di kota/kab. Di antaranya Peningkatan kualitas pelayanan: layanan publik yang dapat diakses sepanjang hari di mana pun (karena teknologi internet) Dengan teknologi online, banyak proses dapat dilakukan dalam bentuk digital, hal ini akan menurunkan penggunaan kertas, atau pekerjaan kertas, sehingga proses lebih efisien dan menghemat Proses dan database terintegrasi menghasilkan data yang lebih akurat dengan biaya yang lebih rendah. kesalahan identitas, dll. Semua proses dapat dilihat karena semua dilakukan secara online.
4. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan (Total Quality Management, atau TQM) adalah paradigma manajemen baru yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing organisasi melalui peningkatan terus menerus. Atas kualitas produk, jasa, karyawan, dan lingkungan perusahaan. TQM mungkin dicapai. Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: berpusat pada pelanggan, obsesi kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kolaborasi tim, perbaikan sistem berkesinambungan, pendidikan, dan pelatihan, sementara Gaspersz (1997) menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus Memperhatikan: ketepatan waktu, akurasi, dan kesopanan kemudahan mendapat pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, dan keramahan.
5. Kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dengan perkembangan paradigma pemerintahan modern, tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, memungkinkan kerja sama dan pembagian peran. antara elemen swasta, publik, dan pemerintah. Tuntutan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik mendorong pemerintah untuk berbagi peran dengan organisasi non-pemerintah. Ini tidak mungkin. Karena kekurangan dana dan sumber daya manusia, mereka masih harus menyelesaikan semua tugas. untuk bekerja sama dan bekerja sama dengan pihak lain agar Kualitas pelayanan publik dapat dipertahankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, berbagai jenis kerja sama telah digunakan sejak lama, termasuk dalam bentuk privatisasi, kontrak keluar, pengembangan transfer operasi, dan pengembangan sendiri operasi, dan model kolaborasi publik-privasi (PPP) (Latif dan Mustanir, 2019).

4. KESIMPULAN

Hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, berada di antara pola kolaborasi dan konflik. Kolaborasi terjadi ketika birokrasi bekerja secara sinergis dengan aktor politik untuk mewujudkan kebijakan publik dan tujuan pembangunan, yang idealnya didukung oleh profesionalisme dan independensi birokrasi. Namun, konflik sering muncul akibat politisasi birokrasi, di mana tekanan politik mengganggu netralitas dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya politik, dan tantangan reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah struktural dan intervensi politik.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan birokrasi yang profesional, bebas dari kepentingan politik partisan, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, hubungan antara birokrasi dan politik dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, B. (2018). *Ilmu budaya dasar dalam perspektif baru*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anas, F. (2012). Model hubungan antara birokrasi dan politisi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 285.
- Andi, A. A. R., Syarifuddin, H., Jabbar, A., Sellang, K., Razak, M. R. R., & Ibrahim, M. (2021).
- Aziz, Y. M., & Hidayat, S. (2016). *Dinamika sistem politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Dwiyanto, A., et al. (2006). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husni, M. F. (2022). Kebijakan anti kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas birokrasi publik: Sketsa pada masa transisi* (hlm. 157). Yogyakarta: MAP-UGM & Pustaka Belajar.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Latif, A., & Mustanir, A. (2019). *Buku kepemimpinan Adam Irwan 2020* (hlm. 154).
- Latif, A., et al. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.
- Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207-212.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261.
- Purwanto, E. A., & Kumorotomo, W. (2005). *Birokrasi publik dalam sistem politik semi-parlementer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramli, M., et al. (2022). Perilaku rasional politik birokrasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bolemo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(3).
- Sahrir, R. (2022). Strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menghadapi tantangan industri 5.0.
- Sinambela, L. P., et al. (2006). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan dan implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Uceng, A., et al. (2019). Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1-17.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Yudiatmaja, W. E. (2015). Politisasi birokrasi: Pola hubungan politik dan birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3(1), 20.